

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan atau Sumber Lainnya

- Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Vol. III* (Issue 2).
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.713>
- Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)* (2nd ed.). Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. (2021). *Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2020*.
- Iskandar, A. (2021). *SDGs Desa*. <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desas-2/>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Kebijakan Dana Desa 2021*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Masiyah Kholmi. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business & Economics*, 2(2), 357–370. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694/pdf>
- Nafidah, L., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2)(Oktober), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nurillah, S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurusan Akuntansi*, 3(2), 1–13.
- Surya, R. Z. (2019). Analisa Keselarasan SDGs dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Selodang Mayang*, 5(2), 79–84.

Wiridin, D., Nasrin, Aisyah, S., & Ramli, A. (2022). Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. *Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(1), 73–84.

Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 130–141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>

Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

Menteri Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta.

Menteri Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.

Menteri Keuangan. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Pati. 2021. *Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Pati. 2021. *Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Pati. 2021. *Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta